



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**POKOK-POKOK MATERI SIDANG PARIPURNA KE-10
MASA SIDANG III - TAHUN SIDANG 2005-2006**

Gedung Nusantara V, 16 Januari 2006

1. Pembukaan Sidang Paripurna DPD Ke-10 Masa Sidang III Tahun 2005-2006

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu,

- Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir ... orang Anggota DPD dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 159 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPD, kuorum telah tercapai, dan sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka.
- Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahiim*, Sidang Paripurna DPD Ke-10 Masa Sidang III ini kami buka, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK 1 X

2. Agenda Pokok Sidang Paripurna Ke-10 DPD Tahun Sidang 2005-2006

Sesuai dengan jadwal acara, Sidang Paripurna Ke-10 DPD ini mempunyai 2 (dua) agenda pokok yaitu:

- Pembukaan Masa Sidang III DPD Tahun Sidang 2005-2006, dengan penyampaian Pidato Pembukaan oleh Pimpinan DPD; dan
- Penyampaian Hasil Kegiatan di Daerah dari setiap Provinsi.

3. Berdoa

Hadirin yang kami muliakan, sebelum kita memasuki agenda pokok Sidang Paripurna ke-10 DPD, dalam suasana yang masih diliputi perubahan tahun ini kami ingin mengucapkan selamat tahun baru, semoga tahun 2006 merupakan tahun yang lebih baik dari tahun yang lalu dalam segala bidang kehidupan baik duniawi maupun ukhrowi. Selanjutnya baru beberapa hari yang lalu umat Islam di seluruh dunia merayakan Idul Adha, maka kami ingin juga menyampaikan ucapan selamat Idul Adha, semoga kita semua dapat memetik hikmah yang dikandungnya, dan bagi anggota DPD yang menunaikan ibadah haji semoga memperoleh haji yang *mabrur*. Seiring dengan itu, kami ingin mengajak kita semua untuk berdoa bagi negara, bangsa, dan rakyat Indonesia, sehubungan dengan tantangan-tantangan berat yang dihadapi bangsa kita. Semoga tahun yang baru ini akan membawa harapan baru pula dalam upaya kita bersama mengatasi persoalan bangsa, guna mewujudkan

kesejahteraan rakyat dan kedamaian yang hakiki. Untuk itu, kami mohon kepada Kiai dari, berkenan memimpin doa.

4. Pidato Pembukaan Masa Sidang III DPD Tahun 2005-2006.

Selanjutnya dalam kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan beberapa hal untuk mendapat perhatian kita bersama dalam memasuki masa sidang pertama di tahun 2006, atau Masa Sidang III DPD Tahun 2005-2006.

Sidang Dewan yang mulia,

- Satu hari menjelang kita memasuki tahun baru 2006, bumi Kota Palu, Sulawesi Tengah diguncang ledakan bom yang mengakibatkan sedikitnya 5 orang tewas dan lebih dari 40 orang mengalami luka-luka. Aksi pengeboman ini merupakan aksi kedua yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah setelah aksi pertamanya dilakukan di Poso.
- Setelah itu, telah terjadi lagi peristiwa-peristiwa teror dan pembunuhan di Sulawesi Tengah yang kesemuanya itu sangat memprihatinkan. Kita semua sangat mengharapkan Pemerintah dapat mengupayakan untuk mengatasi masalah-masalah di Provinsi Sulawesi Tengah hingga tuntas serta mengembalikan kedamaian dan rasa aman masyarakat di wilayah tersebut. DPD siap membantu Pemerintah dalam upaya ini. Dari rentetan peristiwa tersebut kelihatannya bangsa kita telah dibuat tidak berdaya oleh ulah yang kita ketahui dilakukan hanya oleh sekelompok kecil. Dan hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, selain karena alasan-alasan kemanusiaan juga karena kewibawaan negara harus ditegakkan di manapun, di penjuru tanah air manapun.
- Temuan Tim Gabungan PAH I dan PAH III yang dibentuk DPD, melihat bahwa masalah yang terjadi di Poso bukan merupakan masalah agama dan asumsi bahwa masyarakat radikal sebagai pelaku kerusuhan sampai sekarang belum mendapat pembuktian. Atas masalah ini DPD merekomendasikan perlunya langkah-langkah konkrit serta tindakan tegas dan berani dari Pemerintah untuk mengungkap siapa pun pelakunya tanpa pandang bulu.
- Terkait dengan masalah konflik yang juga terjadi di Papua, DPD telah menurunkan PAH I dan Tim Khusus untuk membantu penyelesaian masalah tersebut. Dari hasil temuan, DPD berpandangan bahwa masalah di tanah Papua harus dilihat dalam konteks ekonomi, sosial dan budaya selain dari sudut politik dan keamanan, antara lain melalui penanganan masalah ketertinggalan pembangunan, infrastuktur, dan kesehatan secara memadai. Sehubungan dengan itu, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkrit dan sungguh-sungguh dalam menjalankan kebijakan nasional antara lain yang berkenaan dengan otonomi khusus, serta yang telah dikeluarkannya, serta membangun dialog yang sinergi antara masyarakat Papua, Irian Jaya Barat, dan Pemerintah Pusat.
- Terkait dengan masalah Irian Jaya Barat yang sampai sekarang masih belum jelas status hukumnya, kami meminta perhatian yang sungguh-sungguh dari PAH I untuk mengambil peran dengan membangun dialog nasional dengan melibatkan seluas-luasnya tokoh masyarakat, tokoh adat, dan Pemerintah Daerah di wilayah Papua dan Irian Jaya Barat. Dengan dialog tersebut diharapkan masalah konflik di tanah Papua dapat segera terselesaikan.
- Terhadap berbagai masalah konflik yang terjadi di Indonesia, DPD berpandangan perlunya keterlibatan masyarakat sipil dalam upaya penyelesaiannya. Hal ini akan membuka ruang pendidikan politik bagi masyarakat sekaligus membuka wawasan, di mana masyarakat sipil dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah nasional baik sekarang maupun yang akan datang.
- Selanjutnya, berkenaan dengan masalah kekurangan bahan pangan dan kelaparan yang menimpa saudara-saudara kita di Papua, beberapa waktu yang lalu Pimpinan DPD telah mengambil inisiatif untuk membentuk sebuah Tim yang bertugas memantau keadaan yang sesungguhnya dan membantu mencari penyelesaian masalah tersebut. Koordinator Tim ini adalah Sdr. Pdt. Dr. Ishak Pamumbu Lambe, dengan anggota Sdr. Midin B. Lamany, SH., Sdr. Sujadi, Sdr. Pdt. Drs. Max

Demetaow, Sdr. Ferdinanda Ibo Yatipay, Sdr. Tonny Tesar, S.Sos., dan Sdr. Marcus Louis Zonggonao, BA. Tim ini telah melakukan kunjungan ke Kabupaten Yahokimo Provinsi Papua, dan untuk itu nanti kami harapkan dapat memperoleh laporan hasil kunjungan tersebut dalam Sidang Paripurna ini.

- Masalah lain yang terus menerus melanda bangsa kita hampir secara sambung menyambung adalah bencana alam. Belum lama ini di Desa Kemiri, Jember-Jawa Timur, telah terjadi musibah banjir bandang dan tanah longsor yang cukup dahsyat yang telah menimbulkan korban jiwa lebih kurang 51 orang, dan menyebabkan puluhan ribu rakyat kehilangan rumah dan harta benda serta harus mengungsi. Hampir bersamaan dengan itu, terjadi bencana tanah longsor yang menimbun Kampung Gunungrejo di Kecamatan Banjarmangu, sekitar 15 kilometer arah utara kota Banjarnegara, Jawa Tengah dengan jumlah korban jiwa diperkirakan sekitar 200 orang, dan juga menyebabkan ribuan rakyat menjadi pengungsi.
- Seperti juga bencana alam yang sama yang terjadi di berbagai daerah, penyebab bencana alam di dua daerah ini disinyalir karena kerusakan lingkungan, khususnya kerusakan hutan yang parah dan tidak mampu menahan guyuran hujan yang turun terus-menerus. Kajadian-kejadian ini seharusnya segera menyadarkan bangsa kita bahwa hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam kita, perlu dikelola secara benar dan terpadu dengan memperhatikan kelestarian dan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Hutan-hutan yang sudah terlanjur rusak perlu segera difungsikan kembali sebagai pelindung alam dan pelindung bagi kehidupan di dunia ini. Dalam hal ini, tugas PAH II sesuai dengan ruang lingkupnya untuk melakukan pemantauan dan penelaahan lebih lanjut mengenai masalah-masalah kehutanan yang dirasakan sudah sangat serius dan di berbagai daerah sudah sangat kritis.
- Sebuah masalah yang telah menjadi perhatian dan bahkan perdebatan masyarakat adalah mengenai persoalan impor beras. Memang Pemerintah dihadapkan pada pilihan yang sulit sebagai akibat kenaikan BBM yang besar di tahun yang lalu, maka inflasi di tahun 2005 telah melambung tinggi mencapai sekitar 17%. Belakangan ini harga-harga beras telah bergerak naik dan dikhawatirkan akan menghambat upaya untuk menekan laju inflasi. Dari sudut penglihatan ini dan dengan tujuan melindungi konsumen, maka pemerintah telah menerapkan kebijakan impor beras pada bulan November yang lalu. Meskipun latar belakang ini telah dijelaskan oleh Pemerintah, namun kebijakan ini mendapat tentangan luas dari masyarakat karena dikhawatirkan mengakibatkan pendapatan petani akan menurun. Dampak dari kebijakan ini dikhawatirkan akan dirasakan oleh petani ketika panen raya tiba yang akan berlangsung dari bulan Februari hingga April 2006 mendatang. Oleh karenanya Pemerintah Daerah di banyak provinsi telah menolak kebijakan impor tersebut dan tidak mengizinkan beras impor masuk ke provinsi-provinsi yang bersangkutan.
- Sesungguhnya betapapun baiknya niat Pemerintah untuk menjaga stabilisasi harga, penanganan masalah beras dapat dilakukan secara lebih baik, sehingga bisa terhindar dari kontroversi yang telah berkembang menjadi isu politik. Petani kita sudah sangat jauh terdesak taraf kehidupannya, dan sektor pertanian serta pendanaan mengalami defisit dalam nilai tukar (*term of trade*) yang menyebabkan proses kemiskinan yang berlarut, maka harga beras yang agak baik bagi petani sebetulnya untuk jangka panjang akan berdampak menguntungkan buat ekonomi nasional. Oleh karena peningkatan daya beli petani akan meningkatkan kemampuan konsumsinya yang pada gilirannya akan mendorong bertambahnya permintaan bagi produksi industri dalam negeri.
- Sekarang ini rasanya sudah terlalu banyak komoditi yang kita impor, terutama komoditi-komoditi di bidang pertanian dan pangan, seperti gula, gandum, kedelai, bahkan garam sekalipun. Rasanya sudah waktunya kita menggalakkan produksi dalam negeri, sebagai basis pembangunan kekuatan perekonomian, bukan hanya dalam mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang ini, tetapi untuk membangun masyarakat yang mandiri dan kokoh landasan perekonomiannya. Sehubungan dengan itu, kami mengharap PAH II segera melakukan pembahasan dengan semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun wakil-wakil para petani untuk turut memecahkan lingkaran ketergantungan kita kepada impor dan mencari alternatif kebijakan yang lebih baik mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

- Kemudian masalah lain yang telah meresahkan masyarakat adalah menyangkut penggunaan formalin sebagai pengawet bahan makanan. Pemberitaan mengenai formalin demikian gencar akhir-akhir ini. Bagi kebanyakan orang, formalin adalah bahan yang lazim digunakan untuk mengawetkan mayat, tapi juga bahan yang murah dan mudah digunakan untuk mengawetkan makanan. Namun formalin menjadi berbahaya ketika melebihi batas toleransi yang masuk ke dalam tubuh baik berupa makanan maupun udara yang masuk melalui mulut, pernapasan, atau kulit.
- Kita ketahui bahwa formalin banyak digunakan oleh usaha rakyat kecil terutama nelayan dan usaha makanan kecil, namun kita tahu juga bahwa produksi perikanan dan industri makanan kecil yang menggunakan formalin justru terbanyak dikonsumsi oleh rakyat kecil, yang tidak punya banyak pilihan. Mereka yang kaya mudah saja memperoleh makanan segar dari super market atau toko yang tidak mungkin dapat dijangkau oleh rakyat berpenghasilan rendah. Menjadi kewajiban Pemerintah untuk menyelamatkan rakyat dari racun yang masuk bersama makanan ke dalam tubuhnya dan akan membuat fatal meskipun secara perlahan. Dalam upaya ini kita dapat mencontoh negara-negara lain termasuk negara berkembang dan negara-negara sekitar kita yang juga mempunyai banyak usaha kecil di bidang perikanan, industri, dan makanan tetapi dapat melakukannya tanpa penggunaan formalin yang sudah ditetapkan secara nasional dan internasional termasuk sebagai bahan berbahaya. Masalah ini karena menyangkut kepentingan dan nasib rakyat kecil di daerah baik sebagai produsen maupun konsumen perlu menjadi salah satu perhatian dalam pengawasan yang akan dilakukan PAH III pada masa sidang ini.
- Hal lain yang perlu menjadi fokus pengawasan PAH III pula adalah berkenaan dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2006 yang baru saja selesai dilakukan.

Anggota Dewan yang terhormat,

- Pada masa sidang yang lalu, kita telah menyampaikan pertimbangan dan pendapat DPD serta melakukan pembahasan atas berbagai RUU, dan telah berhasil pula menyusun dan menyampaikan usul 2 (dua) RUU inisiatif yaitu RUU tentang Pembentukan Kab. Gorontalo Utara dan RUU tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan/Anggota dan Mantan Pimpinan/Anggota Lembaga Negara.
- Untuk masa sidang ini, sebagaimana kita ketahui bahwa telah ditetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2006 yaitu sebanyak 43 RUU. Dari 43 RUU tersebut terdapat 6 RUU yang merupakan usulan dari DPD, yaitu:
 1. RUU tentang Penanaman Modal;
 2. RUU tentang Pasar Modal;
 3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tentang Ketenagalistrikan;
 4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria;
 5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (RUU Kepelabuhanan); dan
 6. RUU tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Atas dasar Prolegnas tersebut, khususnya menyangkut keenam RUU yang merupakan usulan DPD, maka kami mengharapkan dalam Tahun Sidang 2006 ini fokus perhatian dan pembahasan di bidang legislasi kita tujukan pada keenam RUU dimaksud.
- Dari keenam RUU tersebut, 4 (empat) RUU merupakan lingkup tugas PAH II yaitu RUU tentang Penanaman Modal, RUU tentang Pasar Modal, RUU tentang Ketenagalistrikan, dan RUU tentang Pelayaran (Kepelabuhanan). Sedangkan RUU tentang Agraria dan Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berada dalam ruang lingkup tugas PAH I. Kami mengharapkan adanya

koordinasi antara PPUU dan kedua PAH ini untuk dapat mengambil prakarsa yang maksimal agar dalam hal ini target legislasi dapat tercapai.

- Prioritas lain yang perlu segera diselesaikan yaitu membahas RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh. Sebagaimana diketahui bahwa pada Sidang Paripurna yang lalu kita telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna membahas dan menyusun pertimbangan DPD atas RUU tersebut. Meskipun secara resmi RUU itu belum masuk dari Pemerintah ke DPR namun pokok-pokok pikirannya sudah dapat dikembangkan.
- Hasil Pemeriksaan BPK pada Semester I Tahun Anggaran 2004 yang telah kita terima beberapa waktu yang lalu, pada masa sidang ini harus pula menjadi salah satu prioritas pembahasan PAH IV untuk menyusun bahan pertimbangan DPD.
- Kepada Kelompok DPD, dalam rangka penguatan peran DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia perlu terus dirintis dan diupayakan pendekatan ke partai politik atau fraksi di DPR maupun pendekatan langsung ke masyarakat dengan program dan kegiatan yang terfokus dan diselenggarakan dengan seefisien mungkin dengan mendayagunakan secara maksimal sumber daya yang tersedia baik dalam DPD maupun dari luar, seperti lembaga-lembaga internasional, perguruan tinggi, LSM, Pemerintah Daerah dan sebagainya.
- Perlu kami informasikan pula bahwa saat ini delegasi DPD sedang mengikuti acara *Asia Pacific Parliamentary Forum* yang dibuka pagi hari tadi dan akan berakhir pada tanggal 20 Januari 2006 di Jakarta. Adapun delegasi DPD dalam acara tersebut adalah : Dr. Laode Ida (sebagai penasihat delegasi) kemudian Sdr. A. Edwin Kawilarang, Sdr. Ir. Nurdin Tampubolon, Sdr. Pdt. Ishak Pamumbu Lambe, dan Sdr. Hj. Nyimas Ena, MM (sebagai peninjau).
- Kami tidak menyebutkan semua alat kelengkapan satu persatu, hal ini bukan berarti bahwa alat kelengkapan yang lain peranannya tidak penting, dan kita harapkan di tahun 2006 ini melalui berbagai alat kelengkapannya kinerja DPD akan lebih meningkat.

5. Acara Kedua, Penyampaian Hasil Kegiatan di Daerah dari setiap Provinsi.

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 huruf f dan Pasal 146 Peraturan Tata Tertib DPD, kegiatan anggota DPD di daerah dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban anggota DPD untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas dan wewenang DPD.
- Selanjutnya, marilah kita masuki acara berikutnya, yaitu penyampaian hasil kegiatan di daerah dari setiap Provinsi. Mengingat seluruh Provinsi akan menyampaikan laporan, kami meminta agar dalam penyampaian laporan masing-masing Provinsi tidak lebih dari 10 menit. Laporan ini akan disampaikan dalam Sidang Paripurna, yang kita rencanakan berlangsung 2 hari, yaitu hari ini dan besok. Untuk hari ini kami akan mendahulukan Provinsi yang telah siap untuk memberikan laporan, khususnya Provinsi Papua, Jawa Timur, dan Jawa Tengah yang baru-baru ini mengalami musibah dan Sulawesi Tengah yang telah berkali-kali mengalami musibah.

PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL KEGIATAN DI DAERAH DARI WAKIL MASING-MASING PROVINSI

6. Penutupan Sidang Paripurna ke-10 DPD

- Sebelum menutup Sidang Paripurna ke-10 ini, perlu kami ingatkan bahwa Masa Sidang III DPD akan berlangsung mulai hari ini tanggal 16 Januari 2006 sampai dengan 28 Maret 2006. Kami

mengimbau agar waktu yang cukup panjang ini dapat digunakan secara efektif guna menghasilkan kinerja yang optimal.

- Akhirnya, dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, Sidang Paripurna ke-10 kami tutup.
Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Warohamatullahi Wabarokatuh.

KETUK 3 X